

PENGARUH TEMUAN AUDIT, REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN, DAN UKURAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP OPINI AUDIT PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Raihania Salsabila¹, Ickhsanto Wahyudi²

^{1,2}Universitas Esa Unggul, Jakarta

Email: raihaniaa.salsabila@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh temuan audit, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ukuran pemerintahan daerah terhadap opini audit pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel populasi dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji Analisis Regresi Logistik Multinomial. Berdasarkan fakta empiris dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 1) temuan audit tidak mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah; 2) rekomendasi audit mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah; dan 3) ukuran pemerintah daerah mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengaruh, Temuan Audit, Pemerintahan, Opini Audit.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of audit findings, recommendations on audit results, and the size of local government on audit opinions on local governments in Indonesia. This research uses quantitative research. Population sampling technique is done by using purposive sampling method. To test the hypothesis in this study using the Multinomial Logistics Regression Analysis test. Based on empirical facts and hypothesis testing in this study, it can be concluded that: 1) audit findings do not affect audit opinion on local governments; 2) audit recommendations influence audit opinions on local governments; and 3) the size of the local government influences the audit opinion on the local government.

Keywords: Influence, Audit Findings, Governance, Audit Opinion.

A. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai sangat penting dalam suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya pemisahan fungsi antara masyarakat dan pemerintahan. Adanya perbedaan fungsi tersebut menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah. Menurut Suhardjanto & Yulianingtyas (2011) menjelaskan tentang tata kelola yang baik hal ini diharapkan mampu menciptakan sikap transparansi serta akuntabilitas dalam organisasi yang berbasis publik terutama tentang pengelolaan keuangan masyarakat.

Temuan audit ada karena auditor menemukan adanya pelanggaran mengenai pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku ditemukan oleh auditor selama pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, auditor akan memberikan saran atau rekomendasi korektif. Pemeriksaan hasil tindak lanjut adalah kegiatan dan keputusan untuk melaksanakan rekomendasi dari hasil pemeriksaan BPK (IHPS BPK RI Semester II Tahun

2019). Priharjanto & Wardani (2017) menyatakan bahwa temuan dan rekomendasi dikomunikasikan untuk tindakan korektif. Upaya LHP serta inventarisasi temua, dan status tindak lanjut tentang rekomendasi LHP adalah ssalabs atu cara dari lembaga BOK untuk melakukan pemantauan tindak lanjut dari LHP tersebut. Hasil tersebut memiliki tujuan untuk mengungkapkan kualitas penyajian laporan keuangan secara umum karena mengalami peningkatan jika dibanding periode tahun lalu, hal ini tentu perlu peningkatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dari rekomendasi. Pendapat lain yang diberikan BPK adalah merupakan sebuah kesimpulan tentang kualitas dari informasi yang disajikan dalam LKPD. Perbaikan Saran BPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyajian informasi LKPD, meningkatkan opini LKPD(Kusumawardani, 2012). Tindak lanjut yang serius terhadap rekomendasi audit BPK akan menjadi kunci peningkatan kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar & Rudiansyah (2019) yang menyatakan bahwa jumlah temuan dari pemeriksaan SPI serta jumlah temuan dari pemeriksaan kepatuhan yang diuji secara parsial memiliki pengaruh terhadap opini audit BPK. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmi & Ariani (2020) juga meneliti pengaruh temuan audit dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan, penelitian ini memiliki hasil yang sama di provinsi aceh. Penelitian lainnya yang menguatkan pendapat pendapat ini dilakukan oleh Furqan et al. (2020), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik secara umum. Selanjutnya, tentang pelaksanaan audit dalam sektor publik, juga ditemukan bahwa audit temuan memiliki dampak yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan serta kualitas pelayanan publik, namun audit tindak lanjut rekomendasi memiliki pengaruh positif di dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta kualitas pelayanan publik. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka tindak lanjut dari hasil rekomendasi, serta opini audit telah banyak dilakukan (Jensen & Meckling, 1976). Namun demikian masih terdapat *gap* dalam menambahkan variable Ukuran Pemerintah Daerah sebagai variabel yang dapat menjelaskan karakteristik pemerintah daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hubungan antara Temuan Audit terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Temuan audit BPK yaitu berupa temuan kasus ataupelanggaran. Maka dari itu, dilakukan proses audit. Lutfia et al., 2018 menunjukkan dampak jumlah kasus terhadap level pengungkapan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Yang memnunjukkan banyaknya temuan telah memberi dorongan terhadap pemerintah daerah untuk mengungkapkan informasi keuangan kepada publik. Hasil penelitian Winanti (2014) temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit. Semakin banyak jumlah temuan audit, semakin kecil kemungkinan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Temuan audit material secara langsung mempengaruhi laporan keuangan yang menyebabkan salah saji, dan dampaknya terhadap opini penyampaian semakin buruk (Setyaningrum, 2015; Mardiasmo, 2009).

H1: Temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah.

2. Hubungan antara Rekomendasi Audit terhadap Opini AuditPemerintah Daerah

Rekomendasi saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atau BPK adalah berbagai kekurangan/kelemahan selama proses audit. Saran auditor diharapkan mengarah pada peningkatan/peningkatan kinerja ini. Rekomendasi pemeriksa didasarkan pada pemeriksaan yang ditujukan kepada orang atau badan yang berwenang melakukan tindakan atau perbaikan (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 2017). Dalam penelitiannya, Christian & Sutaryo (2015) dan Putri (2015) menyimpulkan bahwa ketika pemerintah daerah mendapat komentar/rekomendasi yang kurang mendalam, komentar kepatuhan pengendalian internal dimungkinkan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Lebih lanjut, penelitian-

penelitian tersebut juga menyatakan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menurunkan rekomendasi.

H2: Rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah.

3. Hubungan antara Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Pemerintah Daerah

Istilah ukuran pemerintah daerah merujuk pada salah satu variabel yang mengukur besar atau kecilnya suatu pemerintahan level daerah yang dapat diukur dari beberapa aspek seperti jumlah pegawai, total aset pemerintah, pendapatan total, serta tingkat dari produktifitasnya. Variabel ini juga menunjukkan seberapa besar sebuah pemerintahan daerah, seperti yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hilmi pada tahun 2012, Mustikarini & Fitriyani pada tahun 2007 yang meneliti tentang berbagai faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan pemerintah, dengan variabel total aset. Penelitian lain yang dilakukan oleh Christian & Sutaryo (2011) dan Suharjanto & Yulianingtyas (2011) menunjukkan bahwa aset dapat mewakili jumlah sumber daya yang telah dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

H3: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah.

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang terdiri dari beberapa pemerintah kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan LKPD tahun 2019 yang telah diaudit oleh BPK. Teknik pengambilan sampel populasi dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Adapun persyaratan sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Indonesia tahun 2019 yang telah menyusun laporan keuangan pemerintah yang lengkap melaporkan bahwa BPK Indonesia telah melakukan audit. Selanjutnya, guna menguji hipotesis maka digunakan uji Analisis Regresi Logistik Multinomial karena variabel dependen memiliki kategori yang lebih dari dua buah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik deskriptif berguna untuk mengelompokkan serta menyajikan data kelompok sampel agar lebih mudah dipahami, hasil tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Temuan Audit	508	4,00	30,00	13,5650	4,40433
Rekomendasi HP	508	0,00	163,00	37,8484	19,59669
Ukuran PEMDA	508	25,70	32,00	28,6008	0,66872
Kualitas LK	508	1,00	4,00	3,8071	0,53863
Valid N (listwise)	508				

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa Variabel Independen yaitu Temuan Audit memiliki nilai min sebesar 4,00 serta nilai max 30,00. Pada variabel temuan audit memiliki nilai *mean* 13,5650 serta nilai std. deviasi 4,40433. Selanjutnya, variabel rekomendasi hasil pemeriksaan memiliki nilai *mean* 37,8484 dengan nilai standar deviasi 19,59669. Ukuran Pemda memiliki nilai min 25,70 dan nilai max 32,00. Dan variabel Ukuran Pemda memiliki nilai rata-rata 28,6008 dengan nilai standar deviasi 0,66872. Selanjutnya variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan yaitu Opini Audit memiliki nilai min 1,00 dan nilai max 4,00.

Dan variabel kualitas laporan keuangan ini memiliki nilai *mean* 3,8071 dengan nilai standar deviasi 0,53863.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan	
	Tolerance	VIF		
1	(Constant)			
	Temuan Audit	.487	2.054	Tidak terjadi multikolinearitas
	Rekomendasi HP	.487	2.054	Tidak terjadi multikolinearitas
	Ukuran PEMDA	.997	1.003	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: data diolah

Data di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 serta nilai VIF di bawah 10, hal tersebut memiliki makna bahwa tidak adanya multikolinieritas pada semua variabel penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Simultan

Model Fitting Information		
Model	Model Fitting Criteria	Likelihood Ratio Tests
	-2 Log Likelihood	Sig.
Intercept Only	520.286	
Final	462.117	.000

Sumber: data diolah

Selanjutnya adalah hasil uji simultandapat dilihat pada tabel 3yang menunjukkan penurunan dari Intercept Only sebesar 520,286 yang turun ke Final sebesar 462,117, dan memiliki nilai sig. yaitu $0,000 < 0,05$ yang artinya dengan adanya variabel independen dapat memberikan nilai akurasi yang lebih baik untuk dapat digunakan memprediksi variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Uji Kecocokan Model

Goodness-of-Fit	
	Sig.
Pearson	.970
Deviance	1.000

Sumber: data diolah

Uji selanjutnya adalah Hasil uji kecocokan model yang tampak pada Tabel 4 diatas yang menunjukkan nilai sig. lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik multinomial sesuai dengan data observasi penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Pseudo R-Square

Pseudo R-Square	
Cox and Snell	.108
Nagelkerke	.169
McFadden	.112

Sumber: data diolah

Berdasarkan Uji Pseudo R-Square diatas yang digunakan untuk menilai seberapa besar variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini menggunakan model yang terbesar yaitu Nagelkerke itu yang memiliki makna bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen memiliki nilai 16,9% sedangkan 83,1% lainnya telah dipengaruhi dari faktor lain di luar penelitian.

Tabel 6. Hasil Uji Likelihood Rasio Tests

Likelihood Ratio Tests		
Effect	Likelihood Ratio Tests	
	Sig.	Kesimpulan
Intercept	.015	
X1	.157	Ditolak
X2	.000	Diterima
X3	.002	Diterima

Sumber: data diolah

Hasil pengujian tersebut memiliki makna bahwa variabel pertama yaitu temuan audit memiliki sig. sebesar 0,157. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan tidak adanya pengaruh variabel temuan audit terhadap opini audit. Selanjutnya variabel terakhir yaitu ukuran pemerintah daerah memiliki sig. sebesar 0,002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap opini audit.

Tabel 7. Paramater Estimasi

Kualitas LK		B	Std. Error	Wald	Sig.
Tidak memberikan pendapat	Intercept	4.827	19.385	.062	.803
	X1	.123	.108	1.316	.251
	X2	.022	.025	.758	.384
	X3	-.420	.678	.384	.536
Tidak wajar	Intercept	20.054	11.506	3.038	.081
	X1	.121	.101	1.449	.229
	X2	-.048	.031	2.512	.113
	X3	-.820	.404	4.121	.042
Wajar dengan pengecualian	Intercept	20.993	7.439	7.963	.005
	X1	-.063	.047	1.782	.182
	X2	.047	.010	23.570	.000
	X3	-.856	.262	10.665	.001

Sumber: data diolah

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai intercept 4,827 menunjukkan apabila tidak terdapat variabel X1,X2,X3 maka nilai opini 4,827 yang berarti nilai probabilitas opini audit WTP menjadi naik dengan faktor 0,803. Koefisien variabel X1 sebesar 0,123 artinya adanya kenaikan nilai variabel opini sebesar 0,123 setiap peningkatan nilai variabel X1. Koefisien variabel X2 sebesar 0,022 hal ini berarti adanya peningkatan nilai variabel opini audit sebesar 0,022 setiap peningkatan variabel X2. Koefisien variabel X3 sebesar -0,420 yang berarti adanya penurunan nilai opini audit sebesar -0,420 setiap peningkatan variabel X3.
- Nilai intercept 20,054 menunjukkan apabila tidak terdapat variabel X1, X2, X3 maka nilai opini 20,054 yang berarti nilai probabilitas opini audit WTP menjadi naik dengan faktor 0,081. Koefisien variabel X1 sebesar 0,121 artinya adanya kenaikan nilai variabel opini sebesar 0,121 setiap peningkatan nilai variabel X1. Koefisien variabel X2 sebesar -0,048 hal ini berarti adanya penurunan nilai variabel opini audit sebesar -0,048 setiap peningkatan variabel X2. Koefisien variabel X3 sebesar -0,820 yang berarti adanya penurunan nilai opini audit sebesar -0,820 setiap peningkatan variabel X3.

Nilai intercept 20,933 menunjukkan apabila tidak terdapat variabel X1, X2, X3 maka nilai opini 20,933 yang berarti nilai probabilitas opini audit WTP menjadi naik dengan faktor 0,005. Koefisien variabel X1 sebesar -0,063 artinya adanya penurunan nilai variabel opini sebesar -0,063 setiap peningkatan nilai variabel X1. Koefisien variabel X2 sebesar 0,047 hal ini berarti adanya peningkatan nilai variabel opini audit sebesar 0,047 setiap peningkatan

variabel X2. Koefisien variabel X3 sebesar $-0,856$ yang berarti adanya penurunan nilai opini audit sebesar $-0,856$ setiap peningkatan variabel X3.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Opini Audit

Hipotesis pertama yaitu temuan audit menyatakan bahwa banyaknya kasus dalam temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Maka dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Dengan demikian, hasilnya tidak mendukung hipotesis.

Hal ini menyatakan bahwa semakin banyaknya temuan audit, artinya tidak dapat membuktikan terjadinya pelanggaran yang dilakukan serta tidak terpenuhinya SOP (standard operating procedure) yang dapat menimbulkan kerugian negara. Artinya semakin banyak temuan audit yang diperoleh auditor, tidak dapat pula memengaruhi tingkat kewajaran laporan keuangan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqan et al. (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif temuan audit terhadap opini audit dan kualitas pelayanan publik yang berlaku untuk semua jenis pengukuran temuan audit, baik yang menggunakan indeks jumlah temuan audit atau hanya menggunakan jumlah temuan audit sistem pengendalian intern atau jumlah temuan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Implikasi dari pengaruh negatif temuan audit terhadap opini audit adalah selain perlunya upaya pencegahan untuk meminimalkan temuan audit oleh pemerintah daerah, juga menyiratkan pentingnya peran auditor eksternal dalam mendeteksi masalah secara tepat dan pada tingkat yang tepat. sekaligus memberikan rekomendasi audit yang efektif, konstruktif dan dapat diterapkan atas temuan audit yang diperoleh selama proses audit.

Pengaruh Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap Opini Audit

Hipotesis kedua menyatakan bahwa rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Dari hasil pengujian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Dengan demikian, hasilnya mendukung hipotesis. Dapat dikatakan bahwa ketika pemerintah daerah mendapat komentar/rekomendasi yang kurang mendalam, komentar kepatuhan pengendalian internal dimungkinkan untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dari hasil yang didapatkan menyatakan bahwa prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menurunkan rekomendasi.

Variabel rekomendasi audit berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan jumlah rekomendasi yang sedikit akan mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas baik untuk tahun tersebut. Hasil penelitian ini mengikuti logika berpikir penelitian. Laporan keuangan yang sangat baik menggambarkan keandalan informasi laporan keuangan, termasuk keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kepatuhan (Hamidayanti, 2018).

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Maka dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit pemerintah daerah. Dengan demikian, hasilnya mendukung hipotesis. Dapat dikatakan bahwa semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tidak disertai dengan semakin tingginya opini audit pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya pemerintah daerah yang belum maksimal dalam menghitung ulang asetnya, terutama dalam

pengelolaan aset tetap dan penatausahaan inventaris. Dengan jumlah total aset yang besar, pemerintah daerah cenderung memiliki kualitas pengelolaan aset yang rendah. Hal ini terlihat dari temuan BPK terkait pengelolaan aset khususnya aset tetap yang pada akhirnya mendapatkan catatan dari BPK yang berdampak pada kualitas audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ihtisyamuddin (2021) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini audit. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas area, semakin banyak aset yang harus dikuasai. Sementara pemerintah daerah yang sempit terbukti lebih berkualitas karena lebih mudah mengelola aset yang ada. Pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset agar dapat berperan lebih signifikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta empiris dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 1) temuan audit tidak memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, temuan audit tidak mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah; 2) rekomendasi audit memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, rekomendasi audit mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah; dan 3) ukuran pemerintah daerah memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, ukuran pemerintah daerah mempengaruhi opini audit pada pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of Local Government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Arifin, J., Tower, G., & Porter, S. (2015). Financial Reporting Compliance in Indonesian Local Governments: Mimetic Pressure Dominates. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), 68–84.
- Peraturan BPK RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
- Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, (2017).
- Christian, Y., & Sutaryo. (2015). Penentu Jumlah Internal Control Compliance Comment dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 11(2), 138–146.
- Furqan, A. C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The Effect of Audit Findings and Audit Recommendation Follow-up on the Financial Report and Public Service Quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535–559.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV*, 1–26.
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Journal Akuntansi*.
- Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 177–191.
- Lutfia, F. I., Maryono, & Bagana, B. D. (2018). Determinan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

- Tengah Tahun Anggaran 2014-2016). *Dinamika Akuntansi Dan Perbankan*, 7(1), 82–95.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Medina, F. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resmi Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*.
- Mustikarini, W. A., & Fitriyasi, D. (2007). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV Banjarmasin, 2004*(32), 1–23.
- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. (2017). Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit, dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 1, 97–110.
- Putri, R. A. (2015). Faktor Karakteristik dan Tingkat Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2013. *Jurnal Akuntansi*.
- Rahmi, M., & Ariani, N. E. (2020). Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (Jimeka)*, 5(4), 497–505.
- Rosalin, F. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pada BLU di Kota Semarang). *Jurnal Akuntansi Ekonomi*, 1–62.
- Sekaran, U. (2011). *Research Methods for Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*.
- Setiyawan, E., & Musdholifah. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Nilai Tukar terhadap Financial Distress pada Perusahaan yang Terdaftar di IDX tahun 2016-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 8(1), 51–66.
- Setyaningrum, D. (2015). Kualitas Auditor, Pengawasan Legislatif dan Pemanfaatan Hasil Audit dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan (SFAC) Nomor 2 Tahun 1980 tentang karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi.
- Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global*, 4(1), 101.
- Tresnawati, F., & Nur Apandi, R. N. (2016). Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kementerian/Lembaga Republik Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 8(1), 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 ayat (5).
- Widarjono, A. (2015). *Statistika Terapan Edisi Pertama*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Widyasaputri, E. (2012). Analisis Mekanisme Corporate Governance pada Perusahaan yang Mengalami Kondisi Financial Distress. *Accounting Analysis Journal*, 1(2).
- Winanti, B. A. (2014). Analisis Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK, Legitimasi Kepala Daerah Serta Pengawasan Pemerintahan terhadap Opini Audit LKPD 2010-2011. *Jurnal Akuntansi*.
- Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8.